

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan penduduk di dunia kerap bertambah saja tiap harinya. Kondisi pertumbuhan penduduk yang tak terkontrol akan sangat berimbas bagi negara yang statusnya masih berkembang sebab akan mempengaruhi mutu dari negara tersebut. Pada tahun 2017, Worldometers mencatat data dunia mengenai kependudukan yang nyaris menyentuh angka 77,4 miliar jiwa. Dimana, angka tertinggi masih diduduki oleh Benua Asia dengan 4,4 miliar jiwa total penduduknya. Sementara untuk peringkat tertinggi di seluruh dunia dipegang oleh China dengan total 1.442.460.510 jiwa, kemudian Negara India menyusul dengan angka sebanyak 1.387.733.380 jiwa, lalu Negara Amerika Serikat pun menyusul dengan angka sebanyak 332.101.500 jiwa. Sementara di peringkat empat dinobatkan kepada Negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. (Worldometer, 2020).

Indonesia sudah menduduki posisi ke-4 selama lebih dari 10 tahun sebagai salah satu negara dengan penduduk tertinggi di dunia. Tak bisa dipungkiri, sebab hak reproduksi adalah kebebasan dari tiap makhluk. Pada tanggal 30 Juni 2020 diperoleh data dari BPS, penduduk Indonesia telah menembus angka 268.583.016 jiwa. Di Indonesia sendiri, peringkat keempat diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 14.799.36 jiwa sebagai total penduduk Sumatera di tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data yang dicatat oleh BPS (BPS, 2020).

BKKN (Badan Koordinasi Berencana Nasional) adalah badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 yang diterbitkan tahun 1970. *Problem* atau permasalahan kependudukan bisa dicegah melalui pengadaan program KB (Keluarga Berencana), sebagai unsur dengan tujuan ikut serta melahirkan kesejahteraan sosial budaya, spiritual, dan ekonomi demi terealisasinya program pembangunan nasional (Kemenkes, 2019).

Target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2020 untuk Program KB yakni pasangan yang aktif melakukan KB dalam usia subur (PUS) yakni 70% (BKKBN 2020). Dalam hal ini BKKBN membentuk indikator-indikator Keberhasilan KB. Indikator tersebut telah disusun harus diraih dalam Renstra BKKBN 2020-2024 dalam Pelayanan KB adalah upaya untuk menyokong kebijakan program KB nasional. Keberlangsungan program KB bisa diukur memakai 3 tolak ukur yang ada kaitannya dengan KB diantaranya meningkatnya angka Prevalansi Pemakaian Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mPCR) pada tahun 2020 sebesar 61,78% lalu memiliki target di tahun 2024 menjadi 63,41%. Tolak ukur yang kedua ialah Angka Fertilitas Total (TFR) pada tahun 2020 sebesar 2,26% dengan harapan menjadi 2,1 di tahun 2024. Terakhir, penurunan kebutuhan ber-KB (Unmet Need) yang tak terpenuhi di tahun 2020 sebesar 8,6% dengan harapan menjadi 7,4% di tahun 2024 (BKKBN, 2020).

Setidaknya sebanyak 4.128.115 orang pengguna KB di Indonesia lebih dominan menjadikan Kontrasepsi Suntik sebagai pilihan alat kontrasepsinya. Pada tahun 2020, jumlah keseluruhan akseptor KB berdasarkan hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) pada tingkat Nasional senilai 22.682.255 yang tertinggi akseptor KB suntik sebanyak 12.562.106 (55,38%), pil 5.611.936

(24,74%), IUD 2.223.291 (9,8%), MOW972.959 (4,29%), implant 687.689 (3,03%), kondom 162.252 (0,71%), MOP102.166 (0,45%), diafragma 21.011 (0,09%), serta cara tradisional 329.644(1,45%). (BKKBN, 2020).

Pada tahun 2020, Indonesia hanya meraih angka 57,9% angka prevalensi pengguna kontrasepsi aktif. Angka ini masih cukup rendah dilihat dari target Nasional yang ditetapkan sebesar 70%. (Kemenkes RI ,2020). Sumatera Utara masih ada di posisi rendah capaian nasional terkait pencapaian indikator program KB di Provinsi Sumatera Utara melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di tahun 2017. Sebesar 58,9% dicapai dari angka capaian sebesar 68% yang menyebabkan masih berada di posisi bawah untuk angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Sementara angka Unmet need masih terbilang tinggi sekitar 17,9% dari 12,6% angka nasional. Meski begitu, Provinsi Sumatera Utara masih terbilang tinggi dalam angka putus pakai keseluruhan metode kontrasepsi yakni 24,65% (BKKBN, 2018).

Tak hanya berperan dalam kesejahteraan keluarga dan pembangunan BKKBN pun juga berperan sehubungan dengan masalah pengendalian penduduk. Sebab didapat beberapa permasalahan dalam realisasi program kependudukan yang memerlukan perhatian lebih diantaranya ialah minimnya informasi yang diperoleh masyarakat dalam pemakaian KB karena ada ditemukan kasus-kasus ibu hamil yang memakai KB saat hamil bukannya setelah keguguran (Sabilla, 2018).

Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Kotapinang, Puskesmas Kotapinang dalam implementasi program KB terbilang serius dalam pengoptimalannya. Berpedoman pada data awal yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diterima data

akumulasi peserta KB aktif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 yaitu 37,138 pasang dan jumlah pasangan usia subur (PUS) ada sebanyak 57,236 pasang, (Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Data jumlah peserta KB aktif di wilayah Kecamatan KotaPinang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Peserta KB

| Puskesmas | Jumlah PUS | Peserta KB Aktif | | Target Indikator SPM 70% |
|------------|------------|------------------|-----|--------------------------|
| | | Jumlah | % | |
| Kotapinang | 3392 | 2195 | 65% | |
| Mampang | 3526 | 2553 | 67% | |

Sumber: Data Sekunder BKKBN 2021

Melalui uraian tabel 1 didapat informasi bahwa di Wilayah Kecamatan kotapinang terdapat 2 Puskesmas, capaian angka prevalensi Peserta KB aktif di puskesmas kotapinang pada tahun 2021 sebesar 65%. Angka ini masih cukup rendah dilihat dari target Nasional yang ditetapkan sebesar 70%. Masih sebesar 67% peserta KB aktif di Puskesmas Mampang. Puskesmas di Wilayah Kecamatan kotapinang memperoleh persentase peserta KB aktif dan masih dikatakan belum mencukupi pencapaian indikator minimal 70% standar pelayanannya. Ada 2195 pemakai KB aktif secara terperinci di Puskesmas KotaPinang tahun 2021 dan PUS 3392. Karenanya, Program KB di Puskesmas Kotapinang berada dalam cakupan 65% dibawah target yang ditentukan.

Kemudian berhubungan dengan implementasi program KB di Wilayah Kecamatan Kotapinang terkhusus di Puskesmas Kotapinang, dipantau dari perspektif studi implementasi dimana keoptimalan perlu dilakukan dalam kebijakan program keluarga berencana tersebut agar bisa mencapai indikator standar pelayanan minimal yang ditentukan guna capaian persentase total peserta KB aktif supaya meningkat. Implementasi kebijakan ialah kegiatan yang muncul

usai diterbitkannya pengarahannya yang resmi dari sebuah kebijakan yang mencakup usaha memproses input guna menciptakan outcome atau output untuk masyarakat (Permana Putra, 2020).

Berdasarkan survey awal dan wawancara pada Maret 2022 dengan penanggung jawab program KB di Puskesmas Kotapinang baik dalam gedung maupun luar gedung untuk melayani KB. Di dalam gedung petugas hanya melayani KB bila ada yang datang karena ketiadaan konseling khusus sehingga pemasangan alat konseling dan kontrasepsi hanya bagi peserta KB yang bertanya, karena anggapan puskesmas untuk masyarakat ialah sudah mengerti apa itu ber-KB sebab telah mendapatkan penyuluhan dari PLKB yang biasa melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Sementara pelayanan bagi peserta yang sebelumnya sudah terjadwal dilakukan diluar gedung. Sekarang ini petugas lebih sering memakai dalam gedung untuk pelayanan meski sarana prasarannya terbilang belum memadai, dimana alat kontrasepsi tidak sesuai keinginan masyarakat yang ingin ber KB. Misalnya sebagian warga ingin injeksi 1 bulan sekali, namun yang tersedia hanyalah untuk 3 bulan Sekali. Oleh sebab itu, ketidaklengkapan sarana prasarana yang ada memicu ketidaksesuaian pencapaian peserta KB yang ditargetkan karena warga tidak jadi ber-KB.

Berdasarkan Penelitian Utari (2018), Implementasi program keluarga berencana di Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat bahwa yang menyebabkan peserta KB menurun sebab minimnya penyuluhan kemasyarakat, karenanya memicu keengganan masyarakat untuk ber KB dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang ber KB, minimnya PLKB memicu kurang baiknya kinerja petugas dan koordinasi yang kurang antara SKPD

kecamatan atau kabupaten/kota.

Berpedoman pada penjabaran-penjabaran diatas, karenanya penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program KB Dalam Upaya Capaian Peserta KB Di Puskesmas Kotapinang.

1.2 Fokus Kajian Penelitian

Fokus kajian penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Program KB Dalam Upaya Capaian Peserta KB Di Puskesmas Kotapinang

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program KB Dalam Upaya Capaian Peserta KB Di Puskesmas Kotapinang

1.3.2 Tujuan khusus

Penelitian ini memiliki sasaran dan tujuan khusus diantaranya:

1. Untuk mengetahui komponen input yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, dan sarana prasarana, stok alat kontrasepsi dalam implementasi program KB di puskesmas KotaPinang.
2. Untuk mengetahui komponen proses yaitu perencanaan, pelaksanaan, penyuluhan monitoring, dalam implementasi program KB di puskesmas KotaPinang.
3. Untuk mengetahui komponen output yakni hasil dari proses capaian peserta KB dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Puskesmas KotaPinang

Bisa memberikan masukan bagi Puskesmas KotaPinang sehubungan dengan pelaksanaan pogram KB.

1.4.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Besar harapan penelitian ini bisa dimanfaatkan semestinya sebagai studi pustaka yang bisa digunakan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Islam Negri Sumatra Utara

1.4.3 Bagi Peneliti

Besar harapan penelitian dapat menjadi sumber referensi kedepannya bagi peneliti selanjutnya sehubungan dengan implementasi program KB.

